

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki begitu banyak kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya. Perbedaan ini mulai dari bahasa, adat, kebiasaan dan sampai pada cara mengelola sebuah daerah itu sendiri. Sumatera barat adalah salah satu propinsi di Indonesia yang memakai sistem pemerintahan lokal sendiri untuk mengatur segala urusan daerahnya. Berbeda dengan kebanyakan propinsi lain di Indonesia yang memakai sistem desa, di Sumatera Barat memiliki keunikan sendiri yaitu dengan istilah sistem *Nagari* dalam menjalankan urusan daerahnya. *Nagari*, bagi dominan masyarakat di Indonesia, mendengar kata *Nagari* mungkin sangat asing di telinga, tetapi tidak bagi penduduk Minangkabau yang ada di Sumatera Barat itu sendiri. *Nagari* ialah wilayah administrasi terendah yang ada di daerah Sumatera Barat.

Nagari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas wilayah *Nagari* ditentukan oleh alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya. *Nagari* memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. *Nagari* merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Pemerintahan *Nagari* sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Disini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa.

Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, *Nagari* merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. tidak ada pemerintahan diatas *Nagari*. *Nagari* merupakan “Republik Mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak *Nagari*. Dalam pemerintahan *Nagari*, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat.

Nagari di Minangkabau lebih dominan pada faktor geneologis (pertalian darah). Beda dengan desa di Jawa yang lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Suasana suku lebih terasa di *Nagari* Minang dibanding teritorial. Sungguh pun demikian *Nagari* yang merupakan sub-kultul (budaya khusus) Minangkabau tidak mengabaikan wilayah. *Nagari* memiliki batas-batas wilayah yang kuat dan ditetapkan dengan sumpah setia moyang ketika *Nagari* baru dibuat. Sistem pemerintahan *Nagari* berkembang sejalan dengan sistem demokrasi dan kelarasan serta perubahan yang terjadi di nagari. Faktor kekuasaan dan pemerintahan juga ikut mempengaruhi perkembangan *Nagari* dari masa ke masa.

Nagari-nagari di Minangkabau bersifat otonom dalam pemerintahannya sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Secara historis pemerintahan *Nagari* merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu- penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat atau *limbago* adat sebagai lembaga atau institusi ada dalam *Nagari*. Sistem Pemerintahan *Nagari* di wilayah Minangkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan *Pagaruyung*. Tetapi

pada masa orde baru sistem pemerintahan orde baru telah rusak oleh rezim yang berkuasa dan dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia (Harahap, 2012: 2). Secara tidak langsung dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang pemerintahan desa tersebut membunuh nilai-nilai pemerintahan lokal di Minangkabau yang dikenal dengan Pemerintahan *Nagari*.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di *Nagari* yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaanya muncul seiring dengan berdirinya suatu *Nagari* dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing *Nagari*. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat *Nagari*, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum.

Desa yang disebut *Nagari* dalam bahasa Minangkabau terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah *Nagari* dan daerah *Taratak*. Daerah *Nagari* dalam sebuah desa biasanya ditentukan oleh adanya sebuah masjid, sebuah balai adat dan tempat untuk pasar sekali atau dua kali seminggu. Masjid, balai adat tempat siding-sidang adat diadakan, pasar dan kantor kepala *Nagari* sebagai gejala yang dibawa oleh pemerintahan Belanda biasanya terletak pada suatu tempat, yang merupakan pusat kehidupan sebuah desa, dan letaknya kira-kira ditengah-tengah sebuah desa, dan pertengahan sebuah jalan memanjang dengan rumah-rumah

kediaman disebelah kiri dan kanannya (Koentjaraningrat, 1976: 243).

Dilihat dari sistem daerah yang unik dari Sumatera Barat ini, yaitu sistem *Nagari*, yang sudah jelas memiliki keunikan lebih kepada pendekatan kekerabatan, sedangkan kebanyakan wilayah di Indonesia lebih kepada pendekatan letak wilayah. Hal ini menjadi sebuah hal penting, karena apa, kita bisa melihat bahwa sistem kekerabatan di Sumatera Barat adalah matrilineal, dimana sistem yang mengabil garis keturunan dari pihak perempuan.

Dari sistem matrilineal ini, dilihat peran perempuan Minang yang sudah dewasa "*Bundo Kanduang*" dalam mengambil semua peran dan fungsi terutama di dalam kawasan *Nagari* yang pada hakikatnya tetap mempergunakan sistem adat dalam pengambilan keputusan. Walaupun secara tertulis di Negara Indonesia, ada wali nagari, namun dalam pelaksanaannya Minangkabau masih tetap menjaga sistem adat, yaitu sistem matrilineal dalam menjalankan roda kehidupan nagari dalam berbagai sektor, salah satunya pembangunan *Nagari*. Secara jelas pula, bahwa sistem matrilineal mengambil peran wanita dewasa Minangkabau atau istilah adatnya "*Bundo Kanduang*" untuk mengambil segala keputusan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama (Jamaludin, 2015: 219).

Ada pula yang mengartikan pembangunan masyarakat sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi sebagai bagi kemajuan sosial

ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Program-program dalam pembangunan masyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan bukan hanya sekedar membuat daftar sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat untuk mengali kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat (Jamaludin, 2015: 220). Pembangunan masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip :

1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan
5. Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras, dan sinergis sehingga tercapai secara optimal.(Jamaludin, 2015: 220).

Strategi pembangunan masyarakat mirip dengan strategi pembangunan desa.karakteristik masyarakat adalah memiliki sifat semangat masyarakat bergotong royong, tidak bersifat individual, membangun secara bersama-sama, melibatkan anggota masyarakat. Dibeberapa wilayah di Indonesia, termasuk di

Sumatera Barat, tujuan pembangunan adalah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang ditujukan untuk memecahkan masalah kependudukan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat harus sesuai dengan potensi yang ada, yang mana bahwa pembangunan masyarakat tingkat daerah adalah penentu untuk perkembangan pembangunan tingkat yang lebih tinggi, yaitu skala nasional (Jamaludin, 2015: 221).

Masalah-masalah pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah pembangunan pendidikan. Daerah Minangkabau sendiri, keadaan pembangunan sangat berhubungan dengan rantau. Persoalan modernisasi bukan lagi persoalan baru pada masyarakat Minangkabau. Kemajuan pendidikan telah menyebabkan urbanisasi, yang di Minangkabau mengambil bentuk “perantauan”, ini adalah salah satu masalah dalam pembangunan daerah di Minangkabau (Koentjaraningrat, 1976 : 257).

Daerah Minangkabau dengan keunikannya, terutama sistem matrilineal ini, dikaitkan dengan teori sosial, ternyata ada persamaan antara sistem matrilineal dengan teori gender dalam pembahasan teori sosiologi. Keduanya sama membahas dan mengutamakan bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa digabungkan, karena pada dasarnya awal dari terbentuknya sistem matrilineal dan gender ini berbeda sejarah.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, dalam sistem matrilineal dan gender memang mengutamakan kedudukan serta fungsi bagaimana laki-laki dan perempuan itu, tanpa menonjolkan salah satu, karena pada dasarnya peran mereka berbeda, tapi tetap setara. Sedangkan, sistem matrilineal dengan teori yang lebih

fokus yaitu feminisme juga ada terdapat persamaan, dimana ini lebih fokus bagaimana peran perempuan dalam lingkungannya. hal ini terbukti dengan adanya julukan *Bundo Kanduang* di Minangkabau, di gender ada yang membahas tentang perempuan ini yaitu feminisme.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas yang telah diuraikan, yang menggambarkan keunikan sistem daerah di Sumatera Barat yang memakai sistem *Nagari* dan cenderung mengambil pendekatan kepada kekerabatan, yaitu matrilineal, jadi penulis bermaksud mengambil fokus kepada peranan *Bundo Kanduang* dalam Pembangunan *Nagari* (Studi Deskriptif Beberapa *Bundo Kanduang* di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat).



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dituntaskan adalah mengenai Peran *Bundo Kanduang* dalam Pembangunan *Nagari*. Oleh sebab itu yang akan menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Eksistensi *Bundo Kanduang* dalam masyarakat *Nagari*.
2. Keterlibatan *Bundo Kanduang* dalam pembangunan masyarakat *Nagari*.
3. Pengambilan keputusan *Bundo Kanduang* dalam masyarakat *Nagari*.
4. Pelaksanaan sistem adat dalam pembangunan masyarakat *Nagari*.
5. Pemanfaatan sistem adat dalam pelaksanaan pembangunan *Nagari*.
6. Dampak peranan *Bundo Kanduang* bagi masyarakat *Nagari*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi *Bundo Kanduang* dalam masyarakat *Nagari*?
2. Bagaimana keterlibatan *Bundo Kanduang* dalam pembangunan masyarakat *Nagari*?
3. Bagaimana dampak peran *Bundo Kanduang* bagi masyarakat adat dalam pembangunan *Nagari*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui eksistensi *Bundo Kanduang* dalam masyarakat *Nagari*.
2. Untuk mengetahui keterlibatan *Bundo Kanduang* dalam pembangunan masyarakat *Nagari*.
3. Untuk mengetahui dampak peranan *Bundo Kanduang* bagi masyarakat dalam pembangunan *Nagari*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperdalam ilmu, pengalaman, dan pengetahuan khususnya tentang masalah peran *Bundo Kanduang* dalam pembangunan *Nagari* di Sumatera Barat. Selain itu juga melatih berpikir sistematis dan menambah latihan membuat karya tulis ilmiah yang benar.

Penelitian ini juga berguna sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya untuk pengetahuan lebih tentang kebudayaan, khususnya mahasiswa Sosiologi di bidang pembangunan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi pemikir dan masukan bagi mahasiswa yang aktif dan sering berbaur dengan kebudayaan dalam pengembangan pembangunan di masyarakat Sumatera Barat.

Sedangkan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Minangkabau, diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagaimana posisi *Bundo Kanduang* yang sebenarnya di situasi saat sekarang ini.

Bagi pemerintah sendiri, diharapkan pengetahuan ini, bisa tetap melestarikan bagaimana searusnya kebudayaan tetap berkembang di suatu wilayah dan memberikan peraturan sesuai karakteristik daerah, teruma Sumatera Barat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun berdasarkan teori-teori sosial terutama dalam gender dan pembangunan. Pembahasan gender dan pembangunan lebih tepat digunakan, dari pada perempuan dan pembangunan, hal ini bukan tanpa alasan, pembahasan tentang perempuan sebagai suatu kelompok memunculkan sejumlah kesulitan. Konsep posisi perempuan dalam masyarakat memberi kesan bahwa ada beberapa posisi universal yang diduduki oleh setiap perempuan di semua masyarakat. Kenyataannya bukan semata-mata tidak ada pernyataan sederhana tentang posisi perempuan yang universal, tetapi di sebagian masyarakat tidaklah mungkin memperbincangkan perempuan sebagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Dalam masyarakat multikultural, latar belakang etnis seorang perempuan bahkan lebih penting daripada kelas.

Istilah gender berguna karena istilah itu mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Jenis-jenis hubungan yang berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekwensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat.

Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu ditetapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan

juga hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembangian kerja, dan hubungan diluar keluarga bisa jadi semuanya diputuskan oleh hubungan gender di dalam unit keluarga itu sendiri.

Salah satu penemuan dalam dasawarsa terakhir pembangunan, tidaklah mungkin beramsumsi bahwa kepentingan setiap orang dalam keluarga itu sama. Kepentingan atau kebutuhan perempuan mungkin sangat berbeda dengan kepentingan laki-laki. Kepentingan ini tidak didasarkan kepada peran biologis perempuan dan laki-laki melainkan peran sosial dan kekuasaan mereka serta perbedaan status yang ada dalam peran-peran sosial itu terkadang dianggap sebagai “kepentingan gender” (*gender interest*).

Yang terpenting dari semua pembicaraan gender dan pembangunan, mengskan kenyataan bahwa inisiatif pembangunan apapun akan dipengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan perempuan sama sekali tidak mungkin mengubah dinamika masyarakat dengan cara tertentu sehingga hanya laki-laki atau perempuan saja yang terpengaruh. Projek pembangunan apapun, akan mempengaruhi laki-laki daan perempuan. Fakta bahwa projek itu akan mempengaruhi mereka dalam berbagai cara, adalah akibat dari posisi yang diduduki mereka dalam masyarakatnya. Dengan menyadari kepentingan dan peran mereka yang berbeda-beda, dan akan tiba pada posisi yang jauh lebih baik untuk memahami proses perubahan sosial. Gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki untuk memahami dan mendukung

perrubahan dalam hubungan gender, yang akan diperlukan jika keseimbangan yang lebih adil dan setara antar jenis kelamin dalam masyarakat tercapai(Mosse, 2007: 11).

Teori sosiologi yang tepat untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari gender itu sendiri yaitu, Dorothy E. Smith tentang *Feminisme*. Pemikiran Smith banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan terutama para sosiolog. Kajian Smith memberikan kontribusi dalam hal transformasi sosiologi. Tidak hanya itu, ia memperluas kajian melalui teori sudut pandang *Feminimes* yang meliputi ras, kelas, dan jenis kelamin (Arisandi, 2015: 164).

Dari teori *feminisme* ini, menelaah lebih jauh hubungan agen di dalam struktur menjadi produk tatanan sosial. Dalam hal ini, dikenal dua jenis teori penindasan struktural, yaitu *feminisme sosialis* dan teori *interseksionalitas*. Feminisme sosialis mengembangkan tiga tujuan, yaitu pertama, melakukan kritik atas penindasan berbeda, tetapi saling terkait yang dilakukan oleh patriaki dan kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan. Kedua, mengembangkan metode yang eksplisit dan tepat untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman luas tentang *materialisme historis*. Ketiga, memasukkan pemahaman tentang signifikansi gagasan kedalam analisi materialis berkaitan dengan determinasi kehidupan manusia. (Arisandi, 2015: 165).

Selain Smith yang mengembangkan teori *Feminis*, ada lagi tokoh yang berfokus kepada gender, yaitu Patricia Hill Collins, dikenal sebagai teoritikus sosial yang banyak meneliti masalah ras, jenis kelamin, kelas sosial, seksualitas serta bangsa, Collins menitikberatkan ada beberapa hal, diantaranya :

1. *Epistimologi interseksionalitas*, yakni menganalisis bagaimana ras, kelas, gender, seksualitas, etnis, bangsa dan usia saling membangun satu sama lain sebagai sistem kekuatan dan konstruksi teoritis.
2. Mengeksplorasi epistimologi dari kajian pengetahuan *emansipatoris*.
3. Meneliti bagaimana pengalaman anak muda dengan isu-isu sosial pendidikan, pengangguran, budaya populer serta aktivitas yang diartikulasikan dengan hubungan fenomena global, khususnya kesenjangan sosial yang kompleks, pembangunan kapitalisme global, transnasionalisme, dan aktivisme politik.

Kehidupan sosial dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan untuk melakukan penindasan oleh agen yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab memproduksi dominas, bahkan ketika dapat menjelaskan struktur sosial yang mengurai keputusan-keputusan tersebut. Collins berpandangan bahwa hal yang paling signifikan ialah eksistensi dan persistensi sudut pandang kelompok sebagai cara memahami masyarakat yang berkembang dari tatanan struktur sosial (Arisandi, 2015: 169).

Definisi pembangunan sosial menurut Midgley (2005:37), adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan.

Pembangunan bisa diupayakan menjangkau mereka kepada siapa pembangunan itu ditujukan. Partisipasi perempuan menghadapi banyak sekali

kendala. Ini merupakan salah satu pelajaran paling jelas yang muncul pada dasawarsa terakhir organisasi perempuan.

Berpikir tentang perempuan dalam pembangunan berarti membayangkan keadaan dimana penyakit-penyakit sekatang ini ditrasformasi. Proses perencanaan kebutuhan gender strategis perempuan semuanya berkisar pada penciptaan model perubahan. Pendekatan pemberdayaan mengandung makna bahwa model perubahan harus dihasilkan oleh perempuan sendiri.

Dalam mempertimbangkan bagaimana bersikap terhadap perempuan dalam proses pembangunan yang telah dan sedang berubah, tampak jelas bahwa berbagai pendekatan selama bertahun-tahun merefleksikan pandangan yang berbeda secara mendasar tentang paradigma pembangunan yang tepat maupun peran ekonomi dan sosial perempuan. Ketidakberhasilan mempertimbangkan perempuan sebagai individu dengan kebutuhan, hak dan kemampuan khusus, hanya akan mengakibatkan peningkatan beban kerja dan tingkat ketegangan perempuan, dan bukannya memperbaiki status dan pilihan mereka. Penting mengakui bahwa, jika sebab-sebab utama subordinasi perempuan tidak diperhatikan, dan kebutuhan yang dijanjikan tidak diprioritaskan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.

Skema Konseptual

